

Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa Dan Pembangunan

Buku ini merupakan buku pelengkap literatur yang berisi tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dan fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Buku ini berisi materi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat, khususnya kondisi kemiskinan masyarakat yang memerlukan peran pemerintah dalam memberdayakannya

Cara mengulasnya berbeda dari kebanyakan buku. Menelaah kebijakan pembangunan dari sudut pandang karakter dan perjalanan hidup, sehingga menjadi kontekstual. —Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Sangat tajam mengupas sisi kemanusiaan kebijakan pembangunan yang nyata. Perlu dibaca para pembuat dan pengambil kebijakan serta pelaksana program. —Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Buku yang menyentuh. Saya bangga penulisnya mampu menerjemahkan kehendak pemimpin dalam menjalankan kebijakannya dengan sangat baik. Buku yang paripurna dan jeli menganalisis kerja seorang pemimpin bangsa dari sudut pandang yang berbeda. —Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan Buku ini bukan biografi, tapi juga bukan buku teknokratik yang berat. Isinya justru mengombinasikan sisi biografis seorang pemimpin dengan kemampuan teknokratiknya mewujudkan Indonesia Maju. Pendekatan itulah yang membuat buku ini menjadi cerita yang hidup. —Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi
Membangun Indonesia adalah membangun manusiaya, mengembangkan peradabannya. Buku ini memberikan penjelasan yang sangat bagus, bagaimana seorang pemimpin bangsa berusaha mewujudkan Indonesia Maju yang kita impikan bersama. —Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator PMK Buku ini memberi nuansa rasa yang hangat ketika mengulas pembangunan infrastruktur. Tidak melulu bicara beton atau angka yang dingin, tapi spirit yang optimis dan emosi yang menyentuh hati. Baru di buku ini ulasan tentang infrastruktur dibahas dengan sentuhan manusiawi. Bukan dari sudut teknis yang beku atau angka-angka yang statis. —Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Baru dalam buku ini saya menemukan alasan dan sekaligus penjelasan, mengapa Pemerintah mati-matian mewujudkan Kartu Indonesia Sehat. Buku ini menggugah kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi republik. Bidang kesehatan dibahas sangat manusiawi di buku ini, sehingga membuat kita sadar, pelayanan kesehatan adalah urusan kemanusiaan. —Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Buku tentang kebijakan dan program pembangunan bisa disajikan dengan nuansa yang kaya emosi dan rasa. Dinding beton atau ruas jalan yang beku diceritakan dengan sangat hidup karena bersumber dari kehendak subjektif pemimpin yang bekerja. —Wishnutama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sangat menginspirasi. Membuat orang tua berbagai kebijakan dan program untuk warga bersumber dari hati pemimpinnya. —Hadi Tjahjanto, Panglima TNI
Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang telah selesai dengan dirinya. Perjalanan hidup yang dilalui Pak Jokowi membuatnya mampu memberikan teladan yang terbaik. Buku ini menggambarkannya dengan sangat luar biasa. —Doni Monardo, Kepala BNPB Sangat layak dibaca para investor dan kalangan usaha, karena menawarkan perspektif positif dan peluang-peluang yang dihasilkan dari berbagai kebijakan pembangunan. —Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia Buku yang menarik. Menggali secara personal perjalanan dan perjuangan manusia, menghubungkannya dengan tanggung jawab publik sebagai pemimpin republik. Termasuk di dalamnya perjuangan menghadirkan energi listrik di seluruh pelosok negeri untuk membuka peradaban baru. — Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Buku yang mampu mengelaborasi gagasan dan kebijakan yang bersifat teknokratik ke dalam bahasa yang ringan dan mudah dipahami siapa saja. Masalah rumit tentang kebijakan dirairkan dengan lugas dan gamblang. —Rhenald Kasali, Pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis UI

Memandang desa sebagai basis potensi kegiatan ekonomi haruslah menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi menuntut kebijakan yang tepat dan tepat dari para pembuat kebijakan dalam upaya pengembangan potensi wilayah pedesaan. Sudah saatnya menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan menjadikan daerah ini sebagai motor utama penggerak roda perekonomian.

Kajian 33 perguruan tinggi (Pertides) di 33 provinsi tentang data dan informasi manfaat dana desa menggambarkan bagaimana dana desa bekerja dan berhubungan perubahan status IDM, bahkan lebih dalam mencari penjelasan manfaat dana desa terhadap capaian tujuan pembangunan desa (peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia, dan penganggulangan kemiskinan. Dengan memanfaatkan metode kajian kuantitatif dan kualitatif, di mana setiap provinsi dipilih 1 kabupaten dan masing-masing 5 desa sebagai lokasi kajian (total 165 desa) maka secara metodologis sudah memberikan representasi kondisi desa secara umum di Indonesia. Adapun di masing-masing desa lokasi terdapat masing-masing 5 orang informan dan 20 orang responden, sehingga hasil wawancara dan hasil survei rumah tangga maka data yang diperoleh dapat dikatakan cukup kaya untuk diolah dan dianalisis menjadi informasi tentang manfaat dana desa oleh masing-masing perguruan tinggi tersebut.

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir

SAMISAKE Sebagai Model Pembangunan Pedesaan

Percinan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa

Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa

Suku Moi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan. Sebagai Negara Kesatuan maka kedaulatan rakyat adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam Negara Federal atau Serikat.1 Dengan demikian, Indonesia hanya mempunyai daerah, bukan staat atau negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, supaya bisa berjalan dengan efektif maka ketiga asas tersebut digunakan pada porsi yang tepat. Sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sejak Indonesia merdeka, maka penyelenggaraan pembangunan terus ditingkatkan dalam segala bidang, termasuk pembangunan kota dan desa sebagai ujung tombak dari pembangunan. Namun demikian, ketimpangan pembangunan menjadi fenomena yang sering terjadi antara pembangunan daerah yang satu dengan daerah lain, terbukti ada beberapa daerah yang ingin melepaskan dari Negara Indonesia. Salah satu contohnya adalah daerah Aceh dan Papua. Ketimpangan pembangunan juga terjadi antara desa dengan kota. Desa selalu diidentikkan dengan keterbelakangan dan kemiskinan, sebaliknya kota selalu diliputi dengan hasil-hasil pembangunan misalnya jalan raya yang cukup bagus dibandingkan desa, juga masih banyak hasil-hasil pembangunan yang bisa kota yang bisa membedakan dengan desa dengan kota.

Buku Persembahan dari Penerbit VisiMedia Pustaka ini dilengkapi Sejarah Undang-Undang tentang Desa dan Bagan tentang Pengaturan Desa Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 #UndangUndang #UndangUndangDesa #Peraturan #PeraturanPemerintah #PeraturanMenteri #PeraturanMenteriDesa #Desa #PemerintahanDesa #KepalaDesa

#PerangkatDesa #PeraturanDesa #PengaturanDesa #DanaDesa #APBDesa #SKBTigaMenteri #MusyawarahDesa #PendampinganDesa #BUMD #SejarahUndangUndangDesa #DesaMandiri #EkonomiDesa

Buku Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan merupakan tulisan yang disarikan penulis berdasarkan pengalaman penulis selama tenaga ahli di ITTO (International Trade Timber Organization) di Kabupaten Humbahas. Buku ini dapat juga digunakan sebagai penunjang mata kuliah Penyuluhan Kehutanan dan Sosiologi Kehutanan. Dengan buku ini diharapkan pembaca mengetahui secara mendasar yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan dan tulisan ini juga untuk mendalami ilmu tentang pemberdayaan masyarakat desa yang rentan dengan kemiskinan. Pengkajian materi buku ini, maka dalam penulisannya dimulai dari Konsep dan Teori Pemberdayaan, Kondisi Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan, Potensi Masyarakat Desa Sebagai Pelaku Perubahan, Tahapan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kawasan Hutan, Penyuluhan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan dan Penutup.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI INDONESIA Penulis : Shaumu Nurdianti Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : April 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Desa dan Kelurahan di Indonesia diberikan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pemahaman yang benar akan kewenangan Desa dan Kelurahan menjadi modal awal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang baik, kewenangan yang dimiliki benar-benar dioptimalkan serta melibatkan semua pihak yang terkait. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang baik dapat terwujud ketika adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat Desa/Kelurahan. Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menggapai mufakat merupakan sebuah sarana utama yang harus dibudayakan sebagai jati diri bangsa Indonesia dalam menentukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan di Indonesia. Buku hadir untuk membahas itu semua. Akhirnya selamat membaca dan semangat untuk membaca. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Perkembangan pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Desa, Community Empowerment for Rural Development (CERD), tahun 2003

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR KAWASAN HUTAN

Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia

Komunikasi, media dan pemberdayaan masyarakat

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN: Teori dan Implementasi

Buku ini berisi gambaran Model Desa Cerdas secara komprehensif yang mencakup keseluruhan dimensi, variabel dan indikator dari model Desa Cerdas, tahapan pengembangan dan tata kelola Desa Cerdas yang dapat diterapkan di Indonesia. Model Desa Cerdas ini merupakan model yang dikembangkan sebagai salah satu alternatif solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan desa selama ini seperti masih tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran desa dan kesenjangan pembangunan perdesaan dengan perkotaan. Sasaran utama dari pengembangan model Desa Cerdas di Indonesia adalah untuk akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan desa di Indonesia dari desa dengan status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, dan maju menjadi desa mandiri. Pertumbuhan jumlah desa mandiri tersebut secara keseluruhan diharapkan mampu mendorong akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan Indonesia menjadi negara maju sebagaimana visi yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan 2045. Buku ini telah berhasil menggambarkan keragaman konsep Desa Cerdas dan telah mencoba membuat rumusan alternatif guna mendasari tawaran model Desa Cerdas yang aplikatif untuk mendorong status kemajuan desa dari desa sangat tertinggal menjadi desa mandiri.

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa harus dilengkapi dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat. Hal ini dapat memudahkan petugas atau perencana Desa dalam menyusun perencanaan pembagunan desa dan penetapan prioritas pembangunan desa yang diusulkan untuk program pembangunan yang di inginkan. Perencanaan pembangunan Desa yang telah disusun untuk selanjutnya dibahas pada forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebang Desa) untuk memperoleh penetapan prioritas pembangunan desa.

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Di samping itu, segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dan juga pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Desa melalui peningkatan pelayanan energi di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, juga memperkuat masyarakat desa sebagai bagian dari pembangunan. Sesuai Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI No. 21 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 juncto Peraturan Menteri Desa No. 8 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendesa No. 21 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa seperti pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

PERENCANAAN DESA TERPADU: Modal Sosial dan Perubahan Lahan

Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Revitalisasi Kelembagaan Lokal

Desa Regeneratif 4.0

Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Terdiri dari : UU Desa PP 43/2014, PP 60/2014 Beberapa Permendagri dan beberapa Permendes terkait Desa

Pemberdayaan masyarakat berbasis klaster adat dan sumber daya alam

Manfaat Dana Desa di Provinsi Bengkulu

Kepala desa dipilih dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengembangkan desa yang dipimpinnya. Kualitas kinerja kepala desa akan sangat menentukan kualitas hasil pembangunan, karena kepala desa merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Untuk itu, kepala desa dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien sehingga harapan serta cita-cita masyarakat desa bisa tercapai.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait

Optimalisasi potensi desa di Indonesia

Pengelolaan potensi desa (partisipasi dan pemberdayaan masyarakat)

Dinamika Pembangunan Pedesaan dan Pertanian

Dana Desa 2016

Buku Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Pengelola Desa Wisata

Desa merupakan awal terbentuknya kota. Kemajuan suatu kota bermula dari titik desa. Oleh karena itu, desa disebut sebagai mitra bagi pembangunan kota. Fungsi desa sebagai mitra pada saat ini dan yang akan datang bagi pembangunan kota adalah sebagai tenaga penggerak pembangunan bagi kota. Semua potensi yang ada di desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia harus dimanfaatkan bagi kelangsgaan dan perkembangan desa dengan seoptimal mungkin. Peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi desa menjadi solusi pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Dengan kemandirian melalui optimalisasi potensi desa, kesejahteraan masyarakat desa diharapkan menjadi lebih terukur.

Tantangan desa dalam menghadapi revolusi industri 4.0 menjadi pisau bermata dua yang dapat berperan sebagai peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan desa yang berkelanjutan. Teknologi tepat guna untuk desa harus dirancang secara komprehensif dengan berbagai pendekatan potensi desa dan sekaligus menjamin keberlanjutan ekosistem desa agar tidak merusak lingkungan. Dengan menghadirkan buku Desa Regeneratif 4.0 ini menjadi pengingat dan menyadarkan kita bagaimana memperlakukan desa dengan segala potensi kearifan lokal mampu bersaing pada era 4.0 dan masih dapat menjaga alam secara regeneratif. Desa Regeneratif 4.0 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Membangun Indonesia yang diawali dari wilayah pinggiran dengan metode menguatkan daerah-daerah serta desa dalam kerangka Negeri Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu bagian 9 Program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga bisa menjadi pekerjaan besar bagi Kementerian Desa untuk dapat menjelaskan pentingnya BUMDes kepada seluruh desa di seluruh pelosok negeri. Dan di sisi lain tantangan yang sangat besar bagi para kepala desa di seluruh nusantara untuk dapat memahami dan menjalankannya. Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu : Bab 1 BUMDes dan Ekonomi Desa Bab 2 Potensi Pembangunan Desa Bab 3 Peran BUMDes Dalam Pembangunan Bab 4 Membangun Desa Dengan Sumber Potensi Bab 5 Dana Desa dalam Perspektif Kelembagaan Publik Bab 6 Pembangunan Desa Melalui Lembaga Keuangan Syariah Bab 7 Perencanaan Dalam Pembangunan Bab 8 Model Perencanaan Pembangunan Desa Bab 9 Eksistensi Pembangunan Dalam Masyarakat Desa Bab 10 Implementasi Pembangunan Saat Ini

Model Desa Cerdas Untuk Membangun Indonesia Maju

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Pemberdayaan masyarakat berbasis klaster adat dan sumber daya alam

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa Tlogoweru

Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa

Ide dasar penulisan buku ini, bertolak dari keinginan penulis dalam pertama, menyebarkan informasi hasil penelitian ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat secara umum maupun terbatas, mengetahui kondisi perencanaan

SAMISAKE, sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan wilayah. Kedua, sebagai akademisi penulis memiliki tanggungjawab sosial dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat memiliki konsep dasar sebagai dasar dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat. Istilah konsep perundang generalisasi suatu gagasan atau gambaran mental yang dinyatakan sebagai simbol atau kata.

Konsep dasar juga diasumsikan sebagai komponen dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Definisi konsep yaitu penyusun utama dalam filsafat pemikiran manusia dan pembentukan pengetahuan ilmiah. Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, yang artinya suatu yang telah dimengerti. Buku ini membahas tentang : Bab 1 Hakikat Pembangunan dan Pelaku Pembangunan Bab 2 Teori Pembangunan dan Strategi Pertumbuhan Bab 3 Paradigma Pembangunan dan Pemerataan Bab 4 Sumber Daya Pembangunan Bab 5 Pembangunan Berbasis Masyarakat Bab 6 Pembangunan Berbasis Kebudayaan, Kearifan lokal, dan Spiritual Bab 7 Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat Bab 8 Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Bab 9 Ruang Lingkup Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Bab 10 Tujuan dan Filosofis Pemberdayaan Masyarakat Bab 11 Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bab 12 Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Bab 13 Model Luaran Pemberdayaan Masyarakat Bab 14 Partisipasi Masyarakat dalam Perlinggungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 15 Asset Based Community Driven Development (ABCD)

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti sekaligus penulis dalam buku ini di Desa Paluh Manan Kabupaten Deli Serdang. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pesisir untuk mendukung pembangunan desa di Desa Paluh Manan ini sangatlah rendah yang akhirnya tidak maksimal. Masyarakat pesisir yang berada di daerah ini, mempunyai pendidikan yang rendah dan mengakibatkan tidak berkembangnya pemikiran yang maju dari masyarakat sekitar desa ini. Maka, melalui model pemberdayaan masyarakat dapat melahirkan atau menciptakan masyarakat yang kreatif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di segala bidang. Masyarakat pesisir di Desa Paluh Manan ini masih belum bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap kemajuan desa, sehingga pemerintah desa harus dapat bekerja keras dan dapat mengajak masyarakat untuk bekerjasama membangun desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan focus grup discussion dan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat dilihat keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam membangun desa. Sedangkan, di masa ini telah adanya program dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana desa. Salah satu hasil yang diperoleh dalam model pemberdayaan masyarakat pesisir ini adalah terbentuknya perkumpulan masyarakat kreatif yang disjngkat dengan PMK, kemudian perkumpulan ini di sahkan menjadi badan hukum dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya, diharapkan perkumpulan ini dapat menjadi panutan atau contoh dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di segala aspek kehidupan.

Regional development and community empowerment towards autonomy with reference to Indonesian law on national development planning.

DESA MEMBANGUN DARI BAWAH

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pondok Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan

KEBIJAKAN DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa

Peran dan kedudukan desa di masa Orde Baru banyak dinilai dan ditempatkan sebagai objek dari beragama kepentingan, sehingga peran desa terasa termajinalkan dalam skim ketatanegaraan. Oleh karenanya, terbitnya UU tersebut dapat dianggap sebagai obat penenang sementara bagi beberapa kalangan atau kelompok-kelompok kepentingan yang secara politis menghendaki terjadinya pembaharuan atau-pun perubahan peran dan fungsi Desa sejalan dengan realitas sosial dan kebutuhan yang ada dalam konteks era globalisasi dan neo liberalisasi.Meskipun payung hukum terhadap kebijakan tentang desa telah dikeluarkan dan diikuti serta diperjelas dengan beragam aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Perda yang dibuat masing-masing daerah, akan tetapi diskursus mengenai ideal type desa ke depan masih banyak diperbincangkan dan diperdebatkan oleh banyak pihak untuk mencari rumusan formasi yang tepat.Sound of Village Governance terus didengarkan pemerintah melalui berbagai cara dan media untuk memperoleh penguatan, membenaran dan penguakan terhadap proses rencana perubahan kedudukan dan fungsi desa di masa depan. Meskipun demikian, diskursus yang terjadi tidak sekedar memperkuat dan membenarkan apa yang telah menjadi kebijakan politik pemerintah, namun ada pula pandangan-pandangan kritis yang acap kali dimunculkan sebagai bagian dari berjalannya demokrasi melalui proses komunikasi-dialogis.

Buku ini ditulis dari hasil penelitian tentang nilai nilai pemberdayaan masyarakat lokal pada suku Moi di Kota Sorong. Suku Moi merupakan pemilik ulayat Kota Sorong tetapi miskin atau termarginalkan, baik dalam bidang pendidikan maupun peluang untuk terlibat di eksekutif dan legislatif. Kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli Kota Sorong mengakibatkan konflik dan membatasi partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. Di sisi lain, masyarakat Moi memiliki nilai nilai kearifan lokal dan modal sosial yaitu nilai-nilai dalam sikap,

perilaku dan tindakan serta tradisi – budaya yang dapat menjadi penggerak pemberdayaan di berbagai bidang kehidupan khususnya bidang ekonomi. Masyarakat Moi juga terbuka terhadap nilai nilai dari luar komunitasnya menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat memupus pandangan bahwa orang Papua sebagai the second class yang telah menciptakan kultur tidak seimbang dalam interaksi antara penduduk asli dan pendatang. Untuk itu, pengelolaan sumber daya manusia suku Moi merupakan kerja sama multistakeholder. Artinya pengelolaan sumber daya manusia suku Moi dilakukan dalam jaringan lembaga masyarakat adat, pendidikan formal, kelompok usaha dan lingkungan masyarakat. Koordinasi dan sinergi diantara stakeholder secara kontinyu dan partisipatif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat suku Moi, berdasarkan nilai nilai budaya Moi sebagai kearifan lokal maupun modal sosial, merupakan kunci keberhasilan program program pemberdayaan masyarakat suku Moi di kota sorong.

Buku ini disusun dalam konteks evaluasi desa-desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan desa sebagai ujung tombak pembangunan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa, disamping meningkatkan kapasitas finansial melalui Dana Desa agar desa meningkat kemampuannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif guna meningkatnya kesejahteraan. Namun demikian, disadari bahwa kapasitas desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun”, masih terbatas. Keterbatasan itu dapat dideteksi pada aras pelaku (kapasitas aparat pemerintah desa dan masyarakat), kualitas tata kelola desa, maupun support system yang mewujud melalui regulasi dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan desa. Hal itu, pada akhirnya mengakibatkan viii kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan kurang optimal sehingga kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kami berharap melalui Perencanaan Desa Terpadu adalah suatu strategi yang tengah menjadi fokus utama untuk meningkatkan perkembangan kawasan perdesaan. Untuk itu, strategi pengembangan perdesaan perlu direncanakan dengan pendekatan-pendekatan tertentu untuk dapat mencapai hasil yang baik. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi pembaca khususnya akademisi dan pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan perdesaan.

Manfaat Dana Desa di Provinsi Kalimantan Barat

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Pengelola Desa Wisata

Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA DI INDONESIA

Pemberdayaan masyarakat desa dalam liputan pers

Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengatur dan membangun desa secara otonom. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang, seyogyanya dapat menjadikan lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok lokal yang dapat kembali berperan menemukan jati dirinya yang selama ini hilang. Dalam upaya mewujudkan suatu proses pembangunan Desa berkelanjutan yang partisipatif, pemerintah Desa bersama-sama masyarakat dapat melakukan revitalisasi lembaga-lembaga lokal yang berkembang di masyarakat. Berbasis riset ilmiah yang penulis lakukan, buku Desa Membangun Dari Bawah Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Revitalisasi Kelembagaan Lokal ini, hendak mengupas terkait bagaimana keragaan berbagai kelembagaan dan kelompok yang ada di perdesaan, baik lembaga formal maupun lembaga non formal (tradisional), serta mendalami tentang bagaimana model kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Riset ini dilaksanakan sebelum ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (atau Undang-undang Desa), namun masih relevan sebagai dokumentasi bagaimana masyarakat desa memperjuangkan kedaulatan desa.

Pendekatan pembangunan pedesaan selama beberapa dekade mengalami pergeseran dari top down ke konsep bottom up meski belum sepenuhnya berjalan sempurna. Dalam proses tersebut seringkali dijumpai adanya dinamika dalam keberjalanannya baik yang baik atau bahkan diwarnai intrik dan konflik. Buku berjudul Dinamika Pembangunan Pedesaan dan Pertanian ini berisi paparan beberapa topik dalam dinamika pembangunan pedesaan dan pertanian, yang mencakup: Bab 1 Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Sifat, Fungsi dan Peran; Bab 2 Dimensi dan Strategi Pembangunan Pedesaan dan Pertanian; Bab 3 Peran Organisasi Lokal: Kelompok Tani Dan Gapoktan; Bab 4 Peran Organisasi Lokal : Kelompok Wanita Tani (KWT), Taruna Tani; Bab 5 Sinergi Penyuluhan dan Program Pemerintah Desa; Bab 6 Peran Penyuluhan dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian; Bab 7 Regenerasi Petani, Bertani Vs Migrasi; Bab 8 Petani Milenial Vs Petani Tradisional; Bab 9 Penyuluh Swadaya: Peluang Dan Tantangan; Bab 10 IT dan Digitalisasi Penyuluhan di Pedesaan; Bab 11 Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pertanian dan Perikanan. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI INDONESIA GUEPEDIA

Pembangunan yang sesungguhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral perhatian atau sebagai subjek yang berperan aktif sehingga pembangunan mempunyai ciri dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan nasional diarahkan untuk partisipasi masyarakat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia, baik dari aspek fisik, mental, dan spiritual (kesehatan), aspek intelektual, dan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa) sehingga pembangunan diselenggarakan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) pada seluruh aspek kehidupan. Pengembangan manusia (human development) dibedakan dengan pengembangan sumber daya manusia (resource development) yang dianggap berkonotasi ekonomi semata. Sebagai sumber daya manusia, manusia semata-mata dipandang sebagai faktor produksi dalam proses ekonomi. Di lingkungan United Nations Development (UNDP) telah berkembang gagasan untuk pengembangan manusia (human development). Dua aspek pengembangan manusia yang perlu dilakukan. Pertama, upaya mengembangkan kemampuan (capability) manusia, yaitu memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dengan usia harapan hidup (life expectancy) yang sehat, memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memperoleh pendidikan agar dapat menanggapi kemajuan zaman, dan memperoleh kesempatan akses dalam mengusahakan sumber-sumber pendapatan, alam, atau pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan.

mengembangkan penggunaan kemampuan dan mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Pembangunan pertanian melalui pemberdayaan masyarakat desa

Dinamika Pembangunan Desa: Kajian 7 Wilayah Pulau tentang Manfaat Dana Desa di Indonesia 2018

Pemberdayaan Masyarakat

Membangun Desa Berprestasi